

**JAFM:**  
**Journal of Accounting and  
Finance Management**

E-ISSN: 2721-3013  
P-ISSN: 2721-3005

<https://dinastires.org/JAFM>   [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)   +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jafm.v6i3>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Kualitas Piutang, Perencanaan Pajak Terhadap Penghasilan Kena Pajak Pada BPR Di Wilayah Bali dan Nusra

I Kadek Adi Sumartha<sup>1</sup>, Herman Ruslim<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, [ikadek.126241117@stu.untar.ac.id](mailto:ikadek.126241117@stu.untar.ac.id)

<sup>2</sup>Pendidikan Profesi Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia, [hermanr@fe.untar.ac.id](mailto:hermanr@fe.untar.ac.id)

Corresponding Author: [ikadek.126241117@stu.untar.ac.id](mailto:ikadek.126241117@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract:** *Taxation is one of the main instruments in managing a country's finances, with the amount of tax payable determined based on Taxable Income (PKP), which is derived from profit after fiscal corrections. Various factors influence Taxable Income, including fiscal corrections for Allowance for Impairment of Earning Assets (PPAP) following the regulatory change from 219/PMK.011/2012 to PMK 74 of 2024, the level of Loan Quality, and Tax Planning. This study aims to empirically examine the effect of PPAP, Loan Quality, and Tax Planning on Taxable Income, using a case study of People's Credit Banks (BPR) in the Bali Nusra region registered with the Financial Services Authority (OJK) in 2023–2024. The study involves 36 companies, resulting in 76 samples across two periods. The data analysis technique used is multiple linear regression. The results show that PPAP and Tax Planning have a positive effect on Taxable Income, while Loan Quality has no significant effect. However, simultaneously, PPAP, Loan Quality, and Tax Planning significantly influence Taxable*

**Keywords:** *Allowance For Impairment of Earning Assets, Loan Quality, Tax Planning, Taxable Income*

**Abstrak:** Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara, besaran pajak yang harus dibayarkan ditentukan berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) hasil dari laba setelah koreksi fiskal. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi Penghasilan Kena Pajak salah satunya besaran koreksi fiskal atas Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dari dampak perubahan regulasi dari 219/PMK.011/2012 menjadi PMK 74 Tahun 2024, tingkat Kualitas Piutang dan Perencanaan Pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara empiris pengaruh PPAP, Kualitas Piutang, dan Perencanaan Pajak terhadap PKP pada studi kasus perusahaan Bank Perekonomian Rakyat di wilayah Bali Nusra yang terdaftar di OJK tahun 2023-2024. Penelitian ini terdiri dari 36 perusahaan sehingga sampel penelitian sebanyak 76 sampel. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor PPAP dan Perencanaan Pajak berpengaruh positif terhadap PKP serta Kualitas Piutang tidak

berpengaruh terhadap PKP. Namun, secara simultan PPAP, Kualitas Piutang dan Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap PKP.

**Kata Kunci:** Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Kualitas Piutang, Perencanaan Pajak, Penghasilan Kena Pajak

## PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam pengelolaan keuangan negara yang memiliki peranan krusial dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi dan mendorong kepatuhan wajib pajak. Penghasilan Kena Pajak (PPH) menjadi komponen vital yang menentukan kontribusi wajib pajak, termasuk Badan Usaha, dalam mendukung pendapatan negara. Dalam konteks korporasi, terutama lembaga keuangan seperti Bank Perkreditan Rakyat (BPR), pengelolaan perpajakan menjadi semakin kompleks seiring dengan dinamika regulasi dan kondisi pasar. Salah satu aspek penting dalam perpajakan perusahaan adalah pengaturan mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP), kualitas piutang, serta perencanaan pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak (PKP). Fenomena terbaru menunjukkan bahwa banyak BPR di wilayah Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) mengalami fluktuasi dalam pembayaran pajak, yang diduga dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat besarnya kontribusi sektor perbankan dalam penerimaan pajak daerah maupun nasional.

BPR sebagai lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di daerah seperti Bali dan Nusra yang memiliki karakteristik ekonomi unik. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, terdapat 1.356 BPR di Indonesia, dengan 131 BPR beroperasi di Bali, Nusa Tenggara Timur sebanyak 11 BPR dan 8 BPR di Nusa Tenggara Barat (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). Namun, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa BPR di wilayah ini menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan kewajiban perpajakannya. Salah satu kasus yang menonjol adalah ketidakstabilan pembentukan cadangan kerugian berupa PPAP akibat tingginya kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*), yang secara langsung memengaruhi laba sebelum pajak dan akhirnya menentukan besaran PPh.

Berdasarkan data statistik perbankan di Indonesia, tingkat NPL BPR di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 14,08%, tertinggi ketiga di Indonesia dan meningkat dari 13,47% pada 2023 (OJK, 2024). Tingginya NPL berpotensi meningkatkan PPAP yang berdampak pada penurunan laba kena pajak, sementara perencanaan pajak yang tidak optimal dapat menyebabkan inefisiensi pembayaran pajak. Regulasi perpajakan terkait PPAP mengalami perubahan signifikan, dari PMK No. 81/2009 ke PMK No. 219/2012, hingga terbaru PMK No. 74 Tahun 2024. Regulasi baru ini memungkinkan pembentukan PPAP sebagai pengurang penghasilan bruto selama memenuhi prinsip kewajaran, kelaziman usaha, dan batasan nilai agunan berdasarkan staging piutang. PMK 74/2024 juga memberikan perlakuan khusus bagi kredit UMKM dan mengatur lebih rinci soal pengakuan PPAP dan restrukturisasi kredit, berbeda dari aturan sebelumnya yang bersifat umum. Perubahan ini berdampak langsung terhadap perhitungan PPh BPR, khususnya di Bali dan Nusra yang memiliki proporsi kredit UMKM tinggi. Studi Supeno (2022) menunjukkan bahwa BPR dengan rasio PPAP tinggi cenderung memiliki penghasilan kena pajak lebih rendah, memperkuat pentingnya evaluasi implementasi regulasi baru dalam strategi perencanaan pajak BPR.

Kualitas piutang merupakan faktor penting yang memengaruhi PPh, di mana piutang dengan kolektibilitas rendah meningkatkan PPAP dan menurunkan laba kena pajak. Namun, pendekatan yang terlalu konservatif dapat menghambat ekspansi kredit. Studi Suwandi &

Nurdin (2024) menunjukkan bahwa manajemen piutang yang baik menurunkan NPL, meningkatkan profitabilitas, dan mengoptimalkan beban pajak, yang relevan untuk diteliti lebih lanjut di Bali dan Nusra karena perbedaan karakteristik sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata musiman di Bali dan pertanian di Nusra. Sementara itu, perencanaan pajak (tax planning) menjadi strategi penting untuk mengelola kewajiban pajak secara legal dan efisien, melalui metode seperti pengelolaan PPAP sesuai PMK 74/2024, pemanfaatan insentif pajak UMKM, serta strategi penundaan pengakuan pendapatan. Namun, penelitian menunjukkan banyak BPR di daerah masih kurang memahami strategi ini karena rendahnya literasi pajak dan akses ke konsultan profesional (Kowaas & Marunduh, 2022). Tax planning yang agresif dapat menurunkan PKP, tetapi berisiko menimbulkan koreksi fiskal jika tidak sesuai prinsip kewajaran (Mataputung, 2024), sehingga penting bagi BPR untuk tetap mematuhi prinsip kepatuhan pajak.

Pemilihan Bali dan Nusra sebagai objek penelitian didasarkan pada kontribusinya yang signifikan terhadap industri BPR nasional, dengan 145 BPR dan aset sebesar Rp 12,4 triliun (OJK, 2023). Bali memiliki ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan UMKM dinamis di sektor perdagangan, kerajinan, dan jasa, sehingga BPR di wilayah ini menghadapi risiko musiman. Sementara itu, Nusra didominasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dengan pembiayaan BPR yang bergantung pada musim dan harga komoditas. Tingginya risiko kredit di sektor ini menyebabkan tingkat NPL di Nusra lebih tinggi dibanding nasional (Zamri et al., 2020), sehingga analisis perpajakan menjadi lebih kompleks.

## **METODE**

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian kuantitatif deskriptif. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan khususnya bank perekonomian rakyat. Penelitian ini dilakukan pada website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia tahun 2023-2024. Pemilihan lokasi penelitian di website resmi OJK dikarenakan OJK sebagai pengawas daripada sektor perbankan terutama mengawasi Bank Perekonomian Rakyat di Indonesia sebagai penyedia jasa penghimpun dan penyaluran dana masyarakat untuk meningkatkan perkembangan ekonomi suatu daerah.

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan bank perekonomian rakyat yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yakni sebanyak 150 BPR. Sampel penelitian ini berjumlah 36 perusahaan yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 27, menggunakan metode analisis regresi. Dalam proses pengujian, digunakan beberapa pendekatan statistik, yaitu analisis regresi linier berganda, uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan melakukan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) guna mengetahui signifikansi pengaruh masing-masing variabel bebas secara bersama-sama maupun secara individual terhadap variabel terikat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Teori Akuntansi Positif**

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam (Martika et al., 2021), Teori Akuntansi Positif bertujuan menjelaskan dan meramalkan praktik akuntansi yang diterapkan perusahaan, yaitu menjelaskan alasan praktik akuntansi tertentu dilakukan dan memproyeksikan kejadian akuntansi yang belum terlihat langsung. Dalam konteks ini, manajemen memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk meminimalkan beban pajak kepada pemerintah. Manajer sering menyajikan laporan keuangan secara konservatif agar tidak menarik perhatian regulator, analisis,

maupun publik. Perusahaan besar lebih mendapat sorotan karena ekspektasi terhadap tanggung jawab sosial dan kontribusi pajak, terutama saat melaporkan laba tinggi (Wulandari, 2022). Di BPR Bali dan Nusa Tenggara, fenomena ini tampak melalui tiga variabel utama: manajemen menetapkan cadangan secara konservatif untuk mengontrol fluktuasi laba, menjaga stabilitas, dan menghindari pelanggaran covenant utang. Tingginya NPL di sektor pertanian/perikanan Nusa Tenggara memengaruhi kebijakan cadangan piutang guna mencegah pelanggaran utang dan menjaga pendanaan. Strategi konservatif ini menurunkan laba kena pajak, mengurangi beban pajak, serta menghindari sorotan dan tekanan publik sesuai prediksi PAT melalui hipotesis political cost dan tax planning.

### **Teory Agency**

Teori Agensi oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam (Angelia & Dwimulyani, 2019) menjelaskan hubungan antara pemilik (prinsipal) dan manajer (agen), di mana perbedaan kepentingan dan informasi asimetris dapat menyebabkan manajer bertindak tidak sejalan dengan kepentingan pemilik (Mulyani et al., 2018). Dalam konteks penghasilan kena pajak, manajer BPR dapat memengaruhi laba melalui kebijakan konservatif dalam penghapusan aktiva produktif, pengelolaan piutang akibat tingginya NPL di sektor pertanian/perikanan Nusa Tenggara, dan strategi perencanaan pajak. Semua tindakan ini mencerminkan respons terhadap tekanan eksternal serta bentuk oportunisme agen untuk menyelaraskan kepentingannya dengan insentif pribadi (Indraswari et al., 2024).

### **Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)**

PPAP adalah cadangan yang dibentuk bank untuk menutup potensi kerugian dari aktiva produktif, seperti kredit dan surat berharga. Sesuai POJK No. 33/2018, PPAP disusun berdasarkan risiko gagal bayar untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan mencerminkan kehati-hatian manajemen. Secara akuntansi, PPAP mengurangi laba sebelum pajak dan dapat digunakan untuk tax minimization. Namun, secara fiskal, hanya PPAP yang sesuai ketentuan PMK No. 219/2012 atau regulasi terbaru yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Selisih antara PPAP komersial dan fiskal menimbulkan beda tetap atau temporer dalam pajak.

### **Kualitas Piutang**

Kualitas piutang adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu, yang menentukan tingkat risiko kredit dan memengaruhi pendapatan, laba, serta beban pajak suatu lembaga keuangan seperti BPR. Berdasarkan POJK No. 33/POJK.03/2018, kualitas piutang ditentukan dari kolektibilitas yang menjadi dasar penentuan PPAP (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Piutang tak tertagih dicatat sebagai kerugian dan menurunkan laba serta penghasilan kena pajak. Manajer dapat menunda atau mempercepat pengakuan piutang bermasalah untuk memengaruhi laporan keuangan dan beban pajak, sesuai teori agensi dan teori akuntansi positif.

### **Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah proses strategis yang dilakukan wajib pajak untuk mengatur transaksi dan aktivitas keuangan secara legal agar memperoleh efisiensi pajak, yaitu dengan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Menurut (Viki & Venny, 2021) tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi perpajakan, sehingga wajib pajak dapat terhindar dari risiko sanksi, baik dalam bentuk denda administratif maupun pidana.

### Penghasilan Kena Pajak

Penghasilan kena pajak adalah jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam satu tahun pajak yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang, setelah dikurangi biaya-biaya yang diperbolehkan, penghasilan tidak kena pajak, dan kompensasi kerugian sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

### Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	72	0,0016	0,0570	0,021926	0,0136146
Kualitas Piutang	72	0,0083	0,3329	0,082303	0,0665145
Perencanaan Pajak	72	0,0241	0,3639	0,177846	0,0537010
Penghasilan Kena Pajak	72	0,6830	2,6756	1,159507	0,3015530
Valid N (listwise)	72				

Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 36 BPR di wilayah Bali-Nusra selama 2023–2024, seluruh variabel penelitian bersifat homogen karena rata-rata masing-masing lebih tinggi dari standar deviasi. Rata-rata PPAP sebesar 0,0219 (min 0,0016, maks 0,0570), menunjukkan tingkat pencadangan antara 0,1%–5,7%. Kualitas Piutang (NPL) rata-rata 0,0823 (min 0,0083, maks 0,3329), menggambarkan NPL terendah 0,8% dan tertinggi 33,2%. Perencanaan Pajak (ETR) rata-rata 0,1178 (min 0,0241, maks 0,3639), berarti efisiensi pajak berkisar antara 2,4%–36,3%. Sedangkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) memiliki rata-rata 1,1595 (min 0,6830, maks 2,6756), menunjukkan laba fiskal antara 68,3% hingga 267,5%.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Table 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		72
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000000
	Std. Deviation	0,252836
Most Extreme Differences	Absolute	0,101
	Positive	0,101
	Negative	-0,062
Test Statistic		0,101
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		0,068
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup> Sig.		0,064
	99% Confidence Lower Interval	0,058
	Upper Bound	0,070

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 112562564.

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,200 ( $> 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal.

### 2. Uji Multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel independen dengan menggunakan nilai Tolerance dan VIF. Adapun hasil pengujian gejala multikolinieritas yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	0,507	1,972
Kualitas Piutang	0,497	2,013
Perencanaan Pajak	0,909	1,101

a. Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel menunjukkan nilai Tolerance di atas 0,10 ( $X_1 = 0,507$ ;  $X_2 = 0,497$ ;  $X_3 = 0,909$ ) dan VIF di bawah 10 ( $X_1 = 1,972$ ;  $X_2 = 2,013$ ;  $X_3 = 1,101$ ). Karena seluruh nilai memenuhi kriteria, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model regresi ini.

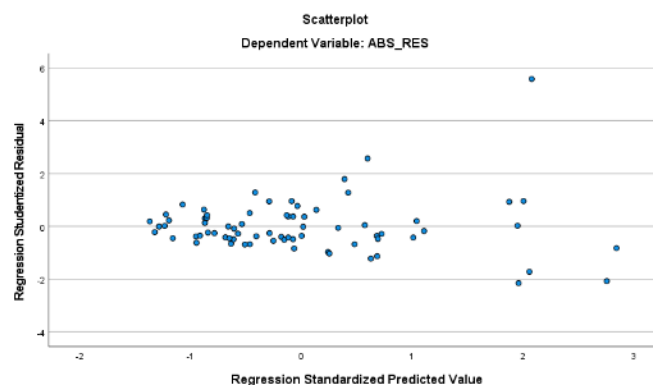
### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah varians residual antar pengamatan berbeda (heteroskedastisitas) atau tetap (homoskedastisitas). Model regresi yang baik menunjukkan homoskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas yang dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-0,033	0,074		-0,451	0,654		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	3,706	1,943	0,290	1,907	0,061	0,507	1,972
Kualitas Piutang	0,439	0,402	0,168	1,093	0,278	0,497	2,013
Perencanaan Pajak	0,549	0,368	0,169	1,492	0,140	0,909	1,101

a. Dependent Variable: ABS\_RES



**Gambar 1. Scatterplot**  
Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi di atas 0,05, dan hasil scatterplot pada Gambar 1 menunjukkan sebaran titik yang acak tanpa pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari gejala heteroskedastisitas.

**4. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan mengetahui ada tidaknya hubungan antara error saat ini dan sebelumnya. Adapun hasil uji autokorelasi yang dilakukan sebagai berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,545 <sup>a</sup>	0,297	0,266	0,2583539	1,834

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengujian, nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,834 berada di antara DU (1,7366) dan 4-DU (2,2634), yaitu  $1,7366 < 1,834 < 2,2634$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami autokorelasi.

**Regresi Linier Berganda**

**Tabel 6. Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
(Constant)	0,640	0,120			5,348	0,001		
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	7,903	3,162	0,357		2,499	0,015	0,507	1,972
Kualitas Piutang	0,558	0,654	0,123		0,854	0,396	0,497	2,013
Perencanaan Pajak	1,690	0,599	0,301		2,822	0,006	0,909	1,101

a. Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan hasil regresi linear berganda menggunakan SPSS versi 27 sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 6 diperoleh persamaan:

$$PKP = 0,640 + 7,903PPAP + 0,558NPL + 1,690ETR + e$$

Artinya, jika seluruh variabel independen bernilai nol, maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 0,640. Setiap kenaikan 1 satuan pada PPAP, NPL, dan ETR akan meningkatkan PKP masing-masing sebesar 7,903, 0,558, dan 1,690. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki arah yang positif terhadap PKP.

**5. Uji Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 di atas, nilai koefisien determinasi (Adjusted R<sup>2</sup>) sebesar 0,266 menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model ini secara bersama-sama mampu menjelaskan 26,6% variasi Penghasilan Kena Pajak, sementara 73,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

## 6. Uji Hipotesis

### 6.1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi secara keseluruhan. Adapun hasil uji F yang dilakukan ditunjukkan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Uji Regresi Secara Simultan**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	f	Mean Square	F	Sig.
Regression	1,918	3	0,639	9,576	0,001 <sup>b</sup>
Residual	4,539	68	0,067		
Total	6,456	71			

a. Dependent Variable: Penghasilan Kena Pajak

b. Predictors: (Constant), Perencanaan Pajak, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, Kualitas Piutang

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil menunjukkan F-hitung sebesar 9,576 lebih besar dari F-tabel 2,740, dengan signifikansi  $0,001 < 0,05$ . Ini berarti model regresi layak, dan variabel PPAP, Kualitas Piutang, serta Perencanaan Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghasilan Kena Pajak.

### 6.2. Uji T

Uji parsial dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Berdasarkan tabel 4.6 diatas menunjukkan:

- a) Hipotesis 1 menyatakan bahwa Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) berpengaruh signifikan terhadap PKP. Hasil uji menunjukkan t-hitung 2,383 > t-tabel 1,99547, sehingga H1 diterima. Hubungannya positif, artinya semakin tinggi PPAP, semakin tinggi PKP.
- b) Hipotesis 2 menyatakan bahwa Kualitas Piutang (NPL) berpengaruh signifikan terhadap PKP. Hasil uji menunjukkan t-hitung 0,854 < t-tabel 1,99547, sehingga H2 ditolak. Artinya, Kualitas Piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap PKP.
- c) Hipotesis 3 menyatakan bahwa Perencanaan Pajak (ETR) berpengaruh signifikan terhadap PKP. Hasil uji menunjukkan t-hitung 2,822 > t-tabel 1,99547, sehingga H3 diterima. Hubungannya positif, artinya semakin tinggi perencanaan pajak, semakin tinggi pula PKP.

## Pembahasan

### 1. Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Penghasilan Kena Pajak

Penelitian menunjukkan bahwa penyisihan penghapusan aktiva produktif berpengaruh positif terhadap penghasilan kena pajak di BPR Bali dan Nusa Tenggara. Artinya, semakin tinggi penyisihan, semakin besar penghasilan kena pajak yang dilaporkan. Menurut Teori Akuntansi Positif, ini mencerminkan pilihan manajemen untuk menunjukkan kehati-hatian dan meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Dalam Teori Keagenan, kebijakan ini menunjukkan tanggung jawab agen terhadap prinsipal. Secara regulasi, penyisihan diatur dalam POJK No. 219/POJK.03/2012 dan PMK No. 74 Tahun 2024. Meskipun dapat mengurangi penghasilan bruto secara fiskal, pencadangan yang konservatif namun tidak diakui secara fiskal justru dapat menaikkan laba pajak.

### 2. Pengaruh Kualitas Piutang terhadap Penghasilan Kena Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas piutang tidak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak. Hal ini berarti bahwa perbedaan kolektibilitas piutang tidak memengaruhi laba pajak secara langsung, selama penyisihan kerugian telah dibentuk secara

memadai. Dalam Teori Akuntansi Positif, hal ini menunjukkan bahwa manajemen tidak menggunakan kualitas piutang untuk memanipulasi laba. Menurut Teori Agency, ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dan kontrol internal.

### **3. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Penghasilan Kena Pajak**

Perencanaan pajak terbukti berpengaruh positif terhadap penghasilan kena pajak. Strategi yang dilakukan secara legal dan sistematis membantu efisiensi pelaporan dan pengelolaan kewajiban pajak. Berdasarkan Teori Akuntansi Positif, perusahaan akan memilih strategi pajak yang menguntungkan secara ekonomis. Teori Agency menjelaskan bahwa perencanaan pajak yang baik menunjukkan tanggung jawab manajemen terhadap pemilik dan otoritas pajak.

### **4. Pengaruh Simultan Ketiga Variabel terhadap Penghasilan Kena Pajak**

Secara simultan, penyisihan, kualitas piutang, dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak. Meskipun kualitas piutang tidak signifikan secara parsial, secara bersama-sama ketiga variabel tersebut berkontribusi terhadap variabilitas laba pajak. Teori *Agency* menjelaskan sinergi ini sebagai bentuk tanggung jawab manajemen dalam menjaga keseimbangan kepentingan. Teori Akuntansi Positif mencerminkan respons manajemen terhadap tekanan regulatif dan fiskal melalui kebijakan yang adaptif dan sesuai konteks.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian pada BPR di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, ditemukan bahwa secara parsial, penyisihan penghapusan aktiva produktif dan perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap penghasilan kena pajak, yang menunjukkan bahwa pembentukan cadangan sesuai ketentuan fiskal serta strategi perencanaan pajak yang dijalankan secara legal dapat mendorong pelaporan fiskal yang lebih optimal; dengan kata lain, semakin tepat dan efisien pengelolaan kedua aspek tersebut, semakin besar pula penghasilan kena pajak yang diakui oleh BPR. Sementara itu, kualitas piutang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak, yang mengindikasikan bahwa perubahan dalam klasifikasi piutang belum memberikan dampak langsung terhadap besarnya laba fiskal. Secara simultan, ketiga variabel yang diteliti, yaitu penyisihan penghapusan aktiva produktif, kualitas piutang, dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghasilan kena pajak, mengindikasikan bahwa kombinasi pengelolaan risiko kredit dan perencanaan fiskal yang terintegrasi merupakan faktor penting dalam menentukan kewajiban perpajakan perusahaan. Temuan ini mendukung pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan sistem pengelolaan keuangan BPR dalam rangka meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan dan fiskal.

Adapun beberapa saran bagi perusahaan agar manajemen BPR memperhatikan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai PMK No. 74 Tahun 2024 untuk efektivitas fiskal dan akuntansi. OJK dan DJP diharapkan memperkuat sinergi kebijakan akuntansi dan perpajakan guna menciptakan sistem pelaporan yang efisien dan konsisten. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel seperti profitabilitas, struktur modal, atau tata kelola, serta memperluas cakupan wilayah atau lembaga keuangan agar hasil lebih generalizable. Bagi akademisi dan praktisi, temuan ini dapat menjadi referensi dalam pengelolaan risiko kredit dan perencanaan pajak di BPR.

## **REFERENSI**

- Adi Syntia, E. R. L. I. N. D. A. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Bpr Tahap Ganda Baturaja. *Doctoral Dissertation, Universitas Bina Darma*.
- Angelia, M., & Dwimulyani, S. (2019). Profitability, Leverage Dan Firm Size Mempengaruhi

- Cash Holding Dengan Tax Avoidance Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–11. <https://doi.org/10.25105/Pakar.V0i0.4324>
- Dian, T. (2020). *Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Dalam Upaya Penghematan Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Pt Bpr. Tulus Puji Rejeki, Kediri)*.
- Indra Wahyu Putra, C. (2024). The Influence Of Non-Performing Loans, Internal Rate Of Return, Capital Adequacy Ratio And Xyz Bank Stock Price On Xyz Bank Performance. *Greenation International Journal Of Economics And Accounting*, 2(3), 237–249. <https://doi.org/10.38035/Gijea.V2i3.223>
- Indraswari, G. A. A. P., Dewi, P. P. R. A., & Budiadnyani, N. P. (2024). Peran Efisiensi Operasional Dan Risiko Kredit Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Maneksi*, Vol 13, No. 4(4), 1115–1122.
- Kellah, S., & Kawulur, H. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan Fiskal Bpr Paraloba Tondano. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 3(3), 527–535. <https://doi.org/10.53682/Jaim.Vi.3262>
- Kementerian Keuangan. (2024). Peraturan Menteri! Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024. *Ayan*, 15(1), 37–48.
- Kowaas, V. V., & Marunduh, A. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Bpr Mapalus Tumetenden Cabang Tondano. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 7, 9.
- Kusumawati, A. (2020). *Evektivitas Tingkat Perputaran Piutang Pada Pt Bpr Tegal Gotong Royong*. 1–11.
- Martika, L. D., Rahmawati, T., & Yunus, S. (2021). Konservatisme Akuntansi: Telaah Mendalam Dalam Kerangka Teori Akuntansi Positif. *Logika: Journal Of Multidisciplinary Studies*, 12(02), 119–129. <https://doi.org/10.25134/Logika.V12i2.5539>
- Mataputung, F. (2024). *Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan 21 Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Paro Laba Tondano*. 2(1), 70–82.
- Menteri Keuangan Negara. (2024). *Pmk 74 Tahun 2024*. 1–25. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pembentukan-cadangan-piutang-tak-tertagih-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto?form=Mg0av3>
- Migliorico, A. (2019). *Restructuring Non-Performing Loans For Bank Recovery: Private Workouts And Securitisation Mechanisms*. <https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1842525/final+guidelines+on+ac->
- Mulyani, A., Endang, W., & Sri, M. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 322–340. <https://doi.org/10.31093/Jraba.V3i1.91>
- Mursida, A. (2023). *Skripsi Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Di Bursa Efek Indonesia Oleh Alifa Mursida Nim: 172800047 Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). (2023). *Statistik Perbankan 2023*.
- Otoritas Jasa Keuangan (Ojk). (2024). *Statistik Perbankan Indonesia 2024*. 22(12).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Pojk Nomor 33/Pojk.03/2018. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33/Pojk.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat*, 1–68.
- Pasang, J., Warongan, J. D. L., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Sam, U., & Manado, R. (2022). Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada Pt . Bank Perkreditan Rakyat ( Bpr ) Paro Laba Tondano Application Of Income Tax Accounting Article 23 At Pt . Rural Bank ( Bpr ) Paro Laba Tondano. *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 503–510.
- Safitri, N., & Atmadja, A. T. (2022). *Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif Dan*

- Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Berdasarkan Pojk 33 Tahun 2018*. 12(3), 630–638.
- Siwi, G. G., Kawulur, A., & Marunduh, A. (2021). Analisis Perencanaan Pajak Dalam Rangka Meminimalisasi Pajak Terhutang Pada Pt Bpr Paro Laba Di Tondano. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 6, 2.
- Sugiyono. (2017). *Business Research Methods: Quantitative, Qualitative, Combination, And R&D Approaches*. 225(87), 48-61.
- Supeno, W. (2022). Analisa Rasio Npl Dan Kap Terhadap Profitabilitas Pada Pt Bpr Supra Artapersada Di Sukabumi Jawa Barat. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 7. <https://doi.org/10.35906/Equili.V11i2.1099>
- Susena, K. C., Nenden, Y., & Hidayah, R. (2025). *Perpajakan Di Masyarakat Untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Taxation In Society For Devalopment And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare Taxation In Society For Development And Welfare*. 1(3), 101–104.
- Suwandi, S. H., & Nurdin, F. (2024). Profitabilitas Bpr Malang : Pengaruh Perputaran Kas, Perputaran Piutang Dan Non Performing Loan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 8(3), 1595–1611. <https://doi.org/10.31955/Mea.V8i3.4613>
- Viki, A., & Venny. (2021). Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 Metode Grossup, Gross, Dan Net Basis Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Journal Of Public Auditing And Financial Management*, Vol 1(2), 102. <https://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/jpafm/article/view/496/262>
- Wulandari, D. S. (2022). Tindakan Agresivitas Pajak Dipandang Dari Teori Akuntansi Positif. *Owner*, 6(1), 554–569. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i1.631>
- Yunita, A. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Nusa Tenggara Timur . *Ekonomi Dan Bisnis*, 13, No.2,(Ekonomi), 77–88.
- Zamri, Y. F., Handajani, L., & Rifai, A. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing Loan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Nusa Tenggara Barat. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(4), 815. <https://doi.org/10.24843/Eja.2020.V30.I04.P01>